



ISSN: 1858-2664

September 2008, Vol. 4 No.2

# JURNAL PENYULUHAN

## KONSEP

### SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN DALAM MENGANTISIPASI ERA PERUBAHAN

Siti Amanah

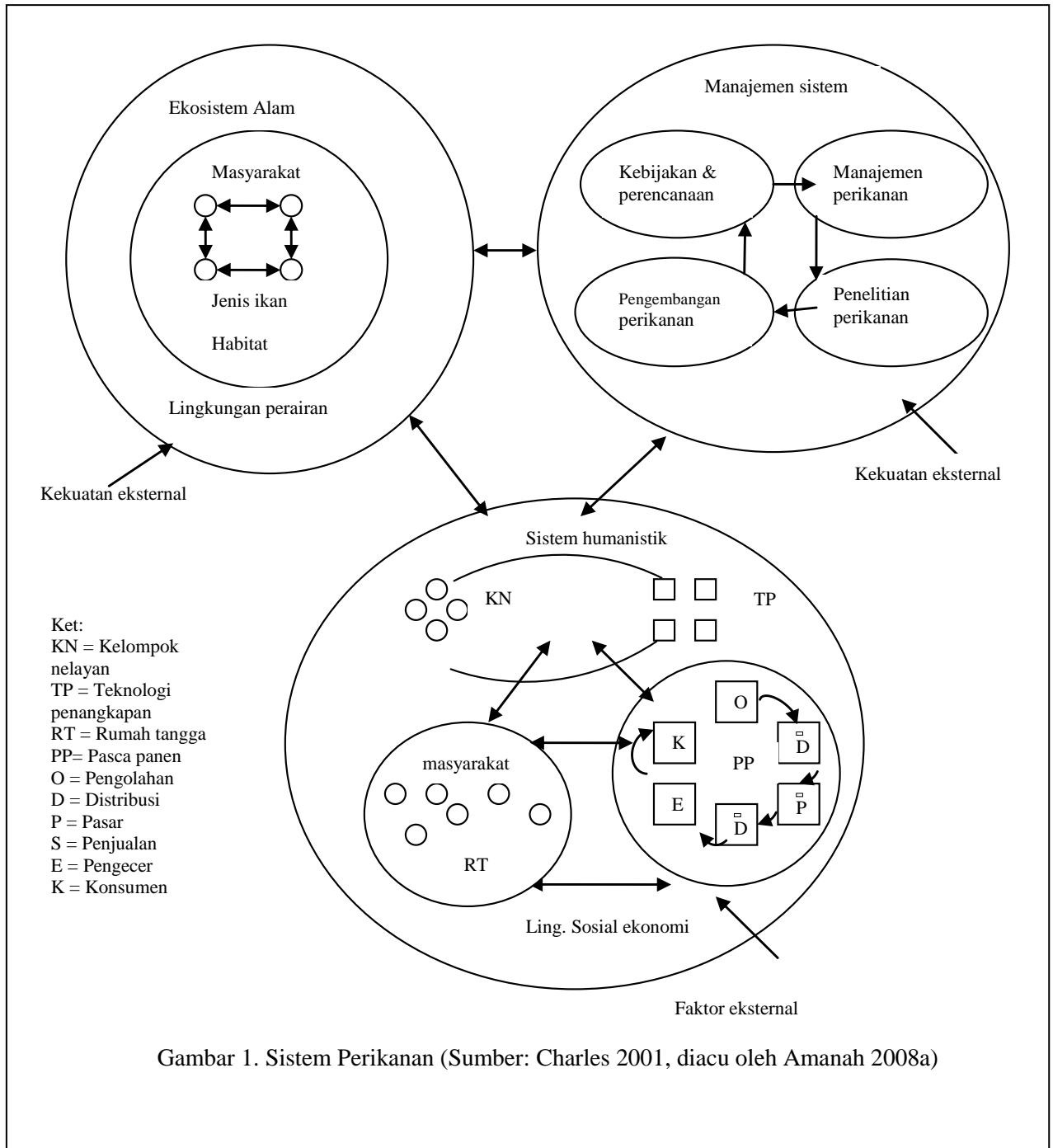
#### Latar Belakang

Sejak diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, institusi penyuluhan di Indonesia berubah sangat cepat. Lembaga penyuluhan di berbagai lembaga mengalami perubahan, ada yang menguat, melemah, dan ada pula yang betul-betul terhapus dalam struktur lembaga pemerintah. Sejak tahun 1980-an, berbagai upaya telah dilakukan untuk melegitimasi sistem penyuluhan melalui peraturan perundang-undangan. Berbagai pertemuan telah dilakukan oleh para pakar, praktisi penyuluh, dan perwakilan dari departemen terkait untuk mengupayakan terbitnya undang-undang yang menjadi payung hukum bagi pengembangan sistem penyuluhan. Baru pada tahun 2006, Undang-undang yang dinanti-nantikan oleh seluruh penyuluh dan pakar penyuluhan pembangunan terbit. Pasca Undang-undang No. 16/2006, kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan perlu senantiasa dikembangkan sehingga menjadi sebuah sistem yang adaptif, inovatif, dan teruji.

Penyuluh perikanan dalam hal ini berperan penting sebagai *agent of change* yang dapat menyokong kinerja sistem penyuluhan tersebut. Selain itu, prinsip mengutamakan kebutuhan pelaku utama harus tetap menjadi paradigma dominan dalam penyelenggaraan sistem penyuluhan tersebut. Implikasinya, ketika profesi penyuluh perikanan telah secara formal dilegitimasi oleh pemerintah, maka kompetensi penyuluh

menjadi penting untuk senantiasa dikembangkan sesuai perubahan yang terjadi. Atas dasar itulah, pembahasan tentang kompetensi penyuluh penting dilakukan sebagai respon atas diakuinya profesi penyuluh perikanan. Keberhasilan penyuluh perikanan dalam menghantar pembudidaya perikanan, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan untuk meningkatkan efisiensi usahanya, mengembangkan kelompok dan organisasi sosial ekonomi, menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan akan berbanding lurus dengan kinerja, dan pencapaian tujuan pembangunan perikanan itu sendiri. Pada prinsipnya penyuluhan menerapkan pendekatan yang serupa dengan yang dipegang oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) RI yaitu *pro-job*, *pro-growth*, dan *pro-poor*.

Tantangan yang dihadapi sektor kelautan dan perikanan sangatlah kompleks, baik pada sub sektor budidaya, penangkapan, pengembangan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pun pada sub sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kondisi sumber daya alam yang berubah dengan drastis, diantaranya sebagai efek perubahan iklim, dan ditambah lagi dengan perilaku eksploitatif yang cenderung deskruktif dalam memanfaatkan potensi pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Hal ini telah mempersulit kehidupan rumah tangga pembudidaya, nelayan, dan pelaku utama lainnya. Oleh karenanya, penyuluhan perikanan harus mampu berperan sebagai sebuah sistem yang menjamin keharmonisan keterkaitan antar tiga sub sistem berikut, yaitu ekosistem alam,



Gambar 1. Sistem Perikanan (Sumber: Charles 2001, diacu oleh Amanah 2008a)

humanistik, dan manajemen sistem (Charles, 2001) seperti tampak pada Gambar 1. Dinamika di dalam sub sistem sangat dipengaruhi oleh pergolakan di dalam subsistem itu dan pengaruh eksternal seperti perubahan dalam struktur hak penguasaan perairan, kerusakan sumber daya pesisir dan laut, dan perangkat peraturan lain yang berpotensi menghambat mobilisasi *vertikal* pembudidaya/nelayan/pengolah *kecil*.

Perjuangan untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan, memerlukan sokongan seluruh elemen masyarakat dan swasta. Begitu pula untuk mengembangkan tata kelembagaan penyuluhan perikanan, mestilah digalang dengan mengakomodasikan peran dan aspirasi multipihak. Hal ini dikarenakan bahwa peran penyuluh dapat melekat pada penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya. Pembahasan dalam makalah difokuskan dalam “profesionalitas penyuluh sebagai elemen

penting dari sistem penyuluhan perikanan yang mantap.”

### Tujuan Penulisan

- (1) Dianalisisnya upaya-upaya peningkatan profesionalitas penyuluh perikanan sebagai *agent of change* dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang perikanan;
- (2) Dianalisisnya alternatif sistem penyuluhan perikanan yang adaptif terhadap perubahan tersebut dan kompleksitas sektor perikanan-kelautan dari dimensi sosio-ekonomi dan lingkungan fisik; dan
- (3) Direkomendasikannya bahan masukan bagi perumusan kebijakan dan strategi dalam sistem penyuluhan perikanan yang inovatif dan efektif

### Penyuluhan Perikanan: Tantangan Dan Peluang

Dilihat dari perspektif pemegang kebijakan, terdapat harapan bahwa sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi pilar penggerak utama bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial badi rakyat. Untuk mewujudkan harapan itu diperlukan dukungan seluruh sub sistem perikanan-kelautan (alam, manusia, dan kebijakan pengelolaan). Terlebih saat ini sektor kelautan dan perikanan dihadapkan pada menurunnya kondisi sumber daya alam, konflik kepentingan atas hak-hak sumber daya perikanan-kelautan, illegal-unreported fishing, tuntutan mutu produk oleh negara-negara pengimpor produk hasil perikanan yang sulit dipenuhi pelaku usaha, dan in-efisiensi biaya produksi.

Selain permasalahan di atas, dampak perubahan iklim juga mempengaruhi kondisi laut, sumber daya ikan, dan lingkungan pesisir. Terjadi perubahan lingkungan yang drastis yang berdampak pada volume hasil tangkapan, keberhasilan budidaya ikan, dan kondisi permukiman nelayan kecil yang memprihatinkan dibandingkan nelayan pemilik modal. Persoalan yang juga dihadapi

oleh komunitas di pulau-pulau terpencil dan pedesaan pesisir terpencil adalah akses yang terbatas terhadap informasi, pendidikan, layanan kesehatan, dan permodalan. Meski sudah ada LEPM3 dan lembaga keuangan lokal yang berupaya memenuhi kebutuhan modal pelaku utama dan usaha, layanan tersebut belum dapat dinikmati oleh segenap pelaku utama dan usaha. Mengantisipasi hal ini, jika penyuluhan perikanan diselenggarakan sesuai kaidah yang benar, maka potensi positif komunitas perikanan akan dapat dikembangkan melalui pendidikan non formal dengan dukungan komunikasi inovasi yang berkelanjutan, guna mewujudkan mutu kehidupan yang lebih baik.

Penyuluhan sering disebut sebagai ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang melandasi kegiatannya. Alex, Zipd, dan Byerlee (2001) mengidentifikasi beberapa tipe layanan penyuluhan dan karakteristik yang dimiliki sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Informasi pada Tabel 1 jika dibandingkan dengan aspek praktis penyuluhan, memperlihatkan penyelenggaraan penyuluhan dalam paradigma dominan yang cenderung linier dan telah berlangsung lebih kurang 80 tahun, mulai bergeser ke tipe-tipe lain sesuai kebutuhan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, pendekatan penyuluhan yang berfokus pada pendekatan linier yang mengutamakan tujuan, menjejali partisipan penyuluhan dengan paket teknologi yang tidak sesuai dengan kebutuhan, pendekatan searah dan *top down* - yang menempatkan masyarakat sebagai obyek, tidaklah efektif, sehingga perlu direkonstruksi (Chambers, 1992; Pretty, 1995; Leeuwis, 2004; Amanah dkk., 2004; Amanah, 2007). Dalam beragam tipe layanan penyuluhan, terlebih di sektor kelautan dan perikanan yang dihadapkan pada Perubahan lingkungan baik fisik, sosial, ekonomi, budaya dan perubahan kebijakan politik berdampak pada semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha.

Tabel 1.Lima Tipe Layanan Penyuluhan menurut Alex, Zijp, and Byerlee (2001)

<b>TYPE OF EXTENSION SERVICE</b>	<b>ORIGIN OR CHARACTERISTICS</b>
<i>GENERAL NATIONAL EXTENSION SERVICES</i>	<i>THE STANDARD APPROACH TO PUBLIC SECTOR EXTENSION WITH FIELD ADVISORY SERVICES PROVIDED FREE TO FARMERS THROUGHOUT THE COUNTRY.</i>
General agricultural extension	The traditional form of extension dominant for the past 80 years.
Training and visit extension (T&V)	Debuted in the late-1960s as a reform of ineffective general extension services.
Strategic Extension Campaign (SEC)	Methodology developed by FAO to systematically incorporating peoples' participation into a national extension programme
Extension by educational institutions	Especially for agricultural universities, can be the dominant approach to national extension.
Publicly-contracted extension	Services provided by private firms or NGOs on contract to government.
<i>TARGETED EXTENSION SERVICES</i>	<i>APPROACHES THAT ATTEMPT TO AVOID THE HIGH RECURRENT COSTS BY FOCUSING EITHER IN TERMS OF SUBJECT MATTER, CLIENTS, REGION, OR TIME.</i>
Specialized extension services	Focus efforts on improving production of a specific commodity or aspect of farming (e.g., irrigation, fertilizer use, and forest management).
Project-based extension	Focus increased extension resources on a defined area for a specific time period
Client-group-targeted extension	Focuses on specific types of farmers, usually on disadvantaged groups, e.g., small farmers, women, and minorities or disadvantaged ethnic groups.
<i>PRODUCER-LED EXTENSION SERVICES</i>	<i>THESE APPROACHES INVOLVE FARMERS IN THE WORK OF EXTENSION DRAWING ON PRODUCERS' KNOWLEDGE AND RESOURCES.</i>
"Animation Rurale" (AR)	Introduced in francophone Africa as a strategy to break the top-down pattern found in most development programmes.
Participatory extension	Harnesses farmers' own capacities to organize group meetings, identify needs and priorities, plan extension activities, and utilize indigenous knowledge to improve production systems.
Farming systems development extension	Requires a partnership between extension, researchers, and local farmers or farmer organizations.
Producer-organized extension services	Completely planned and administered by producers.
<i>COMMERCIALIZED EXTENSION</i>	<i>THESE APPROACHES RELY ON COMMERCIALIZED EXTENSION SERVICES.</i>
Cost-sharing extension	May be incorporated into any of the other extension approaches by requiring farmers to share costs of services.
Commercial extension advisory services	Becoming more common as the rationale for free public extension services is questioned and farmers find they need more dependable or specialized services than are available from public extension agency.
Agribusiness extension	Supports commercial interests of input suppliers and produce buyers who require or benefit from provision of sound extension services to support farm production and management.
<i>MASS MEDIA EXTENSION</i>	<i>THESE APPROACHES SUPPORT OTHER EXTENSION EFFORTS OR PROVIDE INFORMATION SERVICES TO A GENERAL AUDIENCE.</i>
Mass media extension	Provides pure information services tailored to a wide audience.
Facilitated mass media	Links mass media information services with field extension agents or farmer-extensions to facilitate discussion and understanding of issues.
Communications technologies	Allow people in rural areas to interact with specialists or specialized sources of information through rural telephone or internet services possibly institutionalized in "tele-cottages" for community access.

Atas dasar itu, peran penyuluh perikanan yang kompeten sangat diperlukan bagi pengembangan mutu pelaku utama dan usaha. Persoalannya adalah upaya kapasitas penyuluh seringkali tersendat dan tidak berkelanjutan, sehingga hal ini berpengaruh terhadap performance penyuluh di lapangan. Pelaku utama dan usaha memerlukan figur penyuluh yang mampu memainkan peran secara dinamik, artinya penyuluh diharapkan mampu berperan sebagai motivator, partner, konsultan, fasilitator perubahan, dan penasehat. Hal lain yang diharapkan oleh pelaku utama adalah penyuluh memiliki sifat jujur, terbuka, berani mengambil resiko, inovatif, terampil, dan memiliki jaringan yang luas dan kuat, khususnya dalam membantu distribusi atau pemasaran produksi pelaku utama.

Peran penyuluh tidak diragukan lagi sangat diperlukan guna mendukung revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan serta melaksanakan Undang-undang No.16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (web site Departemen Kelautan dan Perikanan yang diakses pada 19 September 2008). Berdasarkan data yang diinformasikan dalam web site tersebut, sampai dengan Agustus 2008, baru tersedia penyuluh sebanyak 4.205 orang, yang terdiri atas 2.840 orang penyuluh PNS yakni penyuluh pertanian yang berlatar belakang perikanan, dan 1.365 orang penyuluh honor atau kontrak. Untuk memenuhi kebutuhan di lapangan diperlukan sebanyak 9.440 orang penyuluh perikanan PNS yang harus dipenuhi selama kurun waktu lima tahun. Secara ideal, sebagaimana disajikan pada Tabel 2, untuk memfasilitasi masyarakat yang melakukan usaha di bidang perikanan, diperlukan sebanyak 16.030 orang penyuluh perikanan yang harus dicapai pada tahun 2013, dengan komposisi 12.280 orang penyuluh PNS, 2.450 orang penyuluh perikanan swasta, dan 1.300 orang penyuluh perikanan swadaya yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota setempat (web site Departemen Kelautan dan Perikanan, diakses pada 19 September 2008).

Kebutuhan penyuluh berdasarkan data pada Tabel 2 sulit dipenuhi oleh pemerintah, sehingga keberadaan penyuluh swasta dan swadaya diperlukan untuk menyokong keberhasilan sistem penyuluhan yang dikembangkan. Untuk menjamin efektifitas sistem penyuluhan perikanan, maka profesi penyuluh perikanan memerlukan kesepakatan kompetensi yang harus dimiliki oleh individu yang menyanggah profesi tersebut, yang sudah dibahas pula oleh Pusbangluh DKP di awal tahun 2008 lalu. Pengkategorian penyuluh perikanan, dengan demikian dapat diklasifikasi berdasarkan kompetensi daripada asal lembaganya (PNS, swasta, dan swadaya). Penyuluh perikanan dalam perspektif sistem penyuluhan yang berkelanjutan dituntut memiliki daya adaptabilitas yang tinggi terutama dalam membantu upaya transformasi perilaku pelaku utama dan usaha ke arah yang diharapkan oleh pelaku utama dan usaha. Oleh karenanya, Slamet (2008) menyebutkan bahwa sistem penyuluhan minimal harus meliputi enam unsur utama yaitu: (i) Unsur Pembuat Kebijakan, (ii) Unsur Pelaksana, (iii) Unsur Penelitian, (iv) Unsur Ketenagaan (termasuk Pendidikan dan Pelatihan), (v) Unsur Pendukung dan (vi) Logistik (termasuk materi, media).

Penyuluh dalam sistem penyuluhan perikanan, merupakan unsur pelaksana, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha, diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dapat menjamin SDM Penyuluh memiliki kualifikasi kompetensi kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas/pekerjaan tersebut dengan baik dan benar, seperti dikemukakan dalam Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah No. 31/2006 tentang Sislakernas, menyebutkan bahwa standar kompetensi menjadi acuan dalam mengembangkan program pelatihan berbasis kompetensi. Untuk mengukur kompetensi lulusan program pendidikan dan latihan, dilakukan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang independen.

Tabel 2. Peta Kebutuhan Rekrutmen Tahunan Penyuluh Perikanan Pemerintah 2009-2013

No.	Wilayah	Jumlah yang tersedia (orang)	Rencana Kebutuhan Rekrutmen Penyuluh (orang)					Total
			2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Indonesia Barat	1.455	520	534	527	520	534	4.090
2.	Indonesia Tengah	689	680	600	760	760	610	4.099
3.	Indonesia Timur	696	679	670	688	688	670	4.091
	<b>Jumlah</b>	<b>2.840</b>	<b>1.879</b>	<b>1.804</b>	<b>1.975</b>	<b>1.968</b>	<b>1.814</b>	<b>12.280</b>

Sumber: Pusdatin DKP, 2008

Perumusan dan penyusunan standar kompetensi kerja penyuluh perikanan merupakan tuntutan. Mengacu pada Undang-undang No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), dikemukakan penyuluhan tidak hanya merupakan kegiatan yang melibatkan tenaga fungsional tetapi juga tenaga profesional. Selanjutnya, untuk mendapatkan pengakuan profesional, penyuluh dipersyaratkan untuk mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Proses sertifikasi yang dilakukan oleh LSP mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penyuluh Perikanan yang disepakati oleh multi pihak meliputi masyarakat pemanfaat (pelaku utama dan usaha), pemerintah, dan swasta.

Sebagai landasan kompetensi penyuluh perikanan, perlu disepakati landasan filosofi dan landasan praktis penyuluhan perikanan. Sebelum menetapkan standar kompetensi yang dimaksud, harus jelas dulu praksis penyuluhan perikanan yang dianut. Filosofi penyuluhan yang mendasar perlu diintegrasikan dalam penyuluhan perikanan sebagai bagian dari proses pendidikan, yaitu (i) falsafah pentingnya individu, (ii) falsafah membantu diri sendiri, (iii) falsafah mendidik, (iv) falsafah demokrasi, (v) falsafah bekerja sama, dan (vi) falsafah kontinuitas (Kelsey and Hearne, 1955; Asngari P, 2001). Untuk mengimplementasikan filosofi tersebut ke

dalam tindakan nyata, maka program penyuluhan perlu mengintegrasikan tiga jenis program sebagaimana dikemukakan oleh Boyle (1981), yaitu program pengembangan (*developmental programs*), program kelembagaan (*institutional programs*), dan program penerangan (*informational programs*). Penyuluhan dapat mengkombinasikan berbagai bentuk program di atas sesuai dengan kondisi spesifik sistem masyarakat partisipan penyuluhan. *Developmental program* paling intensif dilihat dari sisi cakupan kegiatan programnya. Kemampuan masyarakat untuk melanjutkan program ketika peran agen pembaharu menurun atau program berakhir, sangat diperlukan bagi kemandirian masyarakat menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan bagi kelangsungan hidupnya.

Peran penyuluh perikanan mirip dengan *community development workers* dalam konteks memfasilitasi pembangunan masyarakat. Oleh karenanya, sangat relevan jika penyuluh perikanan dapat memahami prinsip-prinsip yang penting diterapkan dalam melaksanakan penyuluhan. Prinsip-prinsip itu meliputi 22 prinsip yang perlu dipahami fasilitator dalam pengembangan masyarakat (Ife, 2000): (1) pembangunan dilakukan secara terpadu antar berbagai sektor, bersifat lintas sektoral, tidak ditujukan pada satu sektor semata, (2) pembangunan masyarakat berhadapan dengan kerugian yang bersifat struktural seperti berhadapan dengan

tekanan struktur masyarakat, tekanan etnis, sistem pendidikan dsb, (3) diakuinya hak asasi manusia, (4) berkelanjutan artinya secara ekologis, pembangunan masyarakat hendaknya tidak merusak kelestarian sumber daya alam, (5) mencapai tujuan pemberdayaan, (6) mencakup aspek personal dan politik, (7) diakuinya kepemilikan komunitas, (8) prinsip kemandirian, artinya mendayagunakan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan bantuan dari luar atau minimal mampu mengadakan hubungan yang saling menguntungkan dengan dunia luar, (9) tidak tergantung pada negara, (10) pencapaian tujuan-tujuan jangka pendek dan visi utama, (11) pembangunan yang bersifat organis, (12) komunitas dapat menentukan langkah pembangunan; (13) peran para ahli dari luar komunitas yang proporsional, (14) prinsip membangun masyarakat, (15) orientasi proses dan hasil, (16) keterpaduan proses, (17) tanpa kekerasan, (18) kekhasan, (19) kesepakatan, (20) kerjasama, (21) partisipasi, dan (22) penetapan kebutuhan. Prinsip-prinsip tersebut bukan merupakan urutan, tapi lebih kepada aspek-aspek yang mestinya terkandung dalam suatu kegiatan pengembangan masyarakat.

### **Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Dalam Mengantisipasi Era Perubahan**

Sebagai sebuah sistem pendidikan nonformal, peran penyuluhan perikanan sebagai kebijakan, strategi, program, dan kegiatan untuk menghantar pelaku utama dan usaha ke arah yang diinginkan sangat diperlukan. Peran strategis sistem penyuluhan perikanan dapat dilihat dari tercapainya tujuan pembangunan perikanan yaitu Hal ini tercermin dalam visi pembangunan kelautan dan perikanan: “pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari dan bertanggung jawab bagi kesatuan dan kesejahteraan anak bangsa.” Atas dasar tersebut, peran strategis penyuluhan perikanan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, memiliki fungsi sosial, ekonomi,

budaya, politik, hukum, dan keamanan sebagaimana tersaji pada Tabel 3.

Sistem penyuluhan perikanan erat kaitannya dengan sistem penyuluhan seperti dikemukakan pada uraian di depan (sistem ekosistem alam, manajemen sistem, dan sistem humanistik). Perlu diidentifikasi para pihak yang terlibat dalam masing-masing sub sistem, dan peran penyuluh perikanan ada pada setiap sub sistem. Untuk itu, penyuluh perikanan dapat dikelompokkan secara berhirarki berdasarkan tanggung jawab dan haknya. Penyuluh perikanan dapat dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan, meliputi tingkat satu yang berfokus pada lini terdepan dalam pelayanan penyuluhan; tingkat dua berfokus pada pengembangan program dan merupakan penghubung antara kelompok penyuluh di tingkat satu dan tiga, dan tingkat tiga merupakan penyuluh perikanan yang berfokus pada kegiatan advokasi kebijakan pada lini atas.

Dengan demikian lingkup kerja penyuluh perikanan akan lebih jelas dan beban yang diemban menjadi proporsional dengan kompensasi yang menjadi haknya. Sebagai tenaga fungsional, maka lingkup kerja penyuluh didasarkan pada fungsinya sebagai tenaga pendamping bagi komunitas nelayan/pembudidaya/pengolah hasil perikanan dan pemasar. Secara mendasar, seluruh penyuluh perikanan harus menguasai prinsip-prinsip penyuluhan terutama terkait dengan kemampuan pengorganisasian masyarakat, komunikasi informasi-inovasi, dan advokasi. Secara spesifik, penyuluh perikanan dapat mengembangkan kekhususan sesuai bakat, minat, dan konsistensi bidang yang dimilikinya, bisa di bidang budidaya perairan, teknologi penangkapan ikan, pengolahan, pemasaran dan pengembangan kelembagaan sosial-ekonomi perikanan. Pada level keparan, penyuluh perikanan memilih spesialisasi yang ditekuninya, misalnya ahli pengembangbiakan kerapu tikus, ahli vaksin untuk pemberantasan virus pada ikan mas, ahli budidaya ikan air deras, bahkan bukan tidak mungkin ada penyuluh yang menguasai bidang pemuliaan.

Tabel 3. Identifikasi Peran Strategis Penyuluhan Pembangunan

Dimensi	Peran penyuluhan	Prasyarat
Sosial	Penguatan hubungan sosial antar pelaku utama dan pelaku usaha melalui kelompok yang dibentuk oleh kesadaran masyarakat sendiri	Kesadaran untuk menumbuh kembangkan kelompok berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan
Ekonomi	Sebagai upaya memotivasi masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan mendayagunakan potensi yang ada, pengembangan jaringan kerja sama di sub sistem hulu (pemasok) dan hilir (pemasar) dari usaha yang dilakukan	Keunikan produk (barang dan jasa) yang akan dihasilkan kelompok, dibutuhkan konsumen, adanya teknologi tertentu (lokalit), pemahaman akan risiko dan ketidakpastian, dan mampu menggalang kerja sama dengan pihak terkait
Inovasi, pengetahuan dan teknologi	Sebagai media pengembangan inovasi pengetahuan dan teknologi perikanan spesifik lokasi, tepat guna, efisien, dan berwawasan lingkungan	Sistem penyuluhan dengan mekanisme <i>delivery</i> yang berkesinambungan, setiap sub sistem penyuluhan disokong oleh sumberdaya manusia yang kompeten
Budaya	Pengembangan nilai-nilai luhur pekerti bangsa dan mengintegrasikannya dalam hubungan antar manusia yang harmonis	Kesadaran akan karakter dan pekerti bangsa, integritas diri, dan kelestarian budaya, pengembangan etos kerja positif dalam pengelolaan sumber daya perikanan
Politik	Pengembangan kemandirian dalam pengambilan keputusan oleh subyek penyuluhan, implementasi kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan berpusat pada manusia	Pengambilan keputusan atas pilihan yang ada dan mengetahui strategi mencapai tujuan, kebijakan dan komitmen politik akan pentingnya penyuluhan perikanan
Hukum	Pengembangan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai individu dan bagian dari sistem kemasyarakatan yang lebih luas	Kekondusifan situasi, komitmen penegakkan hukum oleh pemerintah dan masyarakat
Keamanan	Diminimalisirnya masalah yang dapat memicu gangguan keamanan, lintas wilayah di dalam negeri, perbatasan pulau-pulau terluar	Pengembangan sistem keamanan terpadu, baik di dalam negeri, mau pun di perbatasan pulau-pulau terluar

Diadaptasi dari Amanah, 2008b

Komunitas yang berdiam di kawasan pesisir yang sebagian besar merupakan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah dengan skala usaha kecil. Komunitas tersebut umumnya memiliki kesempatan yang terbatas dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan sarana produksi usahanya sehingga terkadang kondisi sosial

ekonominya relatif masih rendah. Tipikal masyarakat nelayan tersebut disajikan pada Tabel 4. Sistem penyuluhan perikanan melalui penyuluh perikanan dengan bekerja bersama masyarakat dan pihak swasta, seyogyanya mampu turut membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi itu, baik dari sisi ekologis, ekonomi, mau pun sosial.



Tabel 4. Kondisi Spesifik Masyarakat di Pedesaan Pesisir

Tipikal	Kondisi Spesifik
<b>Ekologis/ Geografi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zona ekologi yang luas dengan luasan area yang dikelola relatif sempit.</li> <li>- Aspek fisik lautan menyebabkan produktivitas yang tinggi dalam kegiatan satu hari pelayaran</li> <li>- Adanya keterbatasan dalam transportasi laut, pelabuhan atau alternatif untuk memanfaatkan bagian daratan</li> <li>- Berhadapan langsung dengan kondisi alam yang berbahaya seperti angin, arus air, dan berbagai masalah: malaria, kesulitan air bersih, banjir dan kekeringan, dan badai.</li> </ul>
<b>Ekonomik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan umumnya di bawah standar nasional</li> <li>- Kesenjangan pendapatan yang diakibatkan oleh perbedaan sumberdaya, tipe armada dan alat tangkap, dan akses pasar</li> <li>- Sumberdaya yang berfluktuasi dan ketersediaan pasar menyebabkan variasi pendapatan dan ketidakpastian</li> <li>- Lokasi komunitas yang terisolasi membuat biaya tinggi dalam membangun dan memelihara infrastruktur</li> <li>- <i>Investment</i> agak sulit dilakukan, dan modal berlebih di beberapa lapisan masyarakat</li> </ul>
<b>Sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses akan pelayanan sosial terbatas seperti layanan kesehatan dan pendidikan dibandingkan dengan di pedesaan di daratan, walaupun ada terkadang tidak sesuai dengan yang diperlukan</li> <li>- Adanya intervensi orang luar untuk membentuk organisasi untuk <i>self-help</i> yang memberdayakan masyarakat semacam koperasi perikanan, kelompok nelayan dan lain-lain</li> <li>- Keeratan hubungan dalam masyarakat yang cukup tinggi</li> <li>- Ketaktergantungan pada hukum positif, umumnya masyarakat memiliki aturan lokal untuk memanfaatkan sumberdaya setempat</li> <li>- Adanya tindak kejahatan oleh orang-orang tertentu berupa pembajakan, pemukulan dan tindakan lain dan kurang diperhatikan oleh pemerintah</li> </ul>

Sumber: Adaptasi dari Hanson, 1984

Mempertimbangkan kompleksitas kondisi fisik-geografi, sosio-ekonomi perikanan yang dihadapi masyarakat perikanan terutama di pesisir, hasil penelitian Jensen dan Nielsen (1998) dari hasil penelitiannya di Afrika Selatan dan Barat, bahwa pada kasus yang dihadapi nelayan, situasinya jauh lebih kompleks daripada pembudidaya. Komunitas nelayan dihadapkan pada aspek sumber daya perikanan yang dinamis baik dari sisi biologi, ekologi, teknologi perikanan, kerentanan akan konflik penguasaan sumber daya, hak-hak dalam mengakses sumber daya, konflik kepentingan akan stakeholders (pemegang

kebijakan), dan kohesi sosial yang cenderung menurun keeratannya.

Jalan keluar yang ditawarkan adalah sistem insentif bagi pemerintah jika mampu mengelola kompleksitas yang dihadapi oleh komunitas nelayan. Dari sudut pandang peran penyuluh perikanan, maka untuk kondisi di Indonesia yang sangat bervariasi antar masyarakat dan wilayah, dalam memfasilitasi masyarakat nelayan, perlu ada dukungan sistem yang memungkinkan penyuluh dapat melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini dapat dilakukan misalnya melalui kurikulum pendidikan dan latihan yang didalamnya tidak semata diisi dengan substansi teknis perikanan –kelautan, namun harus ada substansi materi

Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi		Kebutuhan Pelaku utama dan usaha	prioritas	Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Perikanan	Pengembangan Kapasitas SDM Penyuluh	Peningkatan Kualitas Pendukung Program Penyuluhan	Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Usaha	Diversifikasi Usaha Berbasis Potensi Lokal dan Keberlanjutan	Peningkatan Kualitas Penelitian dan Diseminasi Hasil	Penguatan Kerjasama Internal dan Eksternal	Monitoring dan Evaluasi		
											Program	Penyuluh	Pelaku Utama dan Usaha
Layanan Penyuluhan Perikanan	Keterjangkauan layanan informasi, advokasi, dan konsultasi												
	Pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan (struktur dan mekanisme kerja, penganggaran)												
	Keterjaminan sarana & prasarana pendukung penyuluhan												
	Pengembangan jaringan												

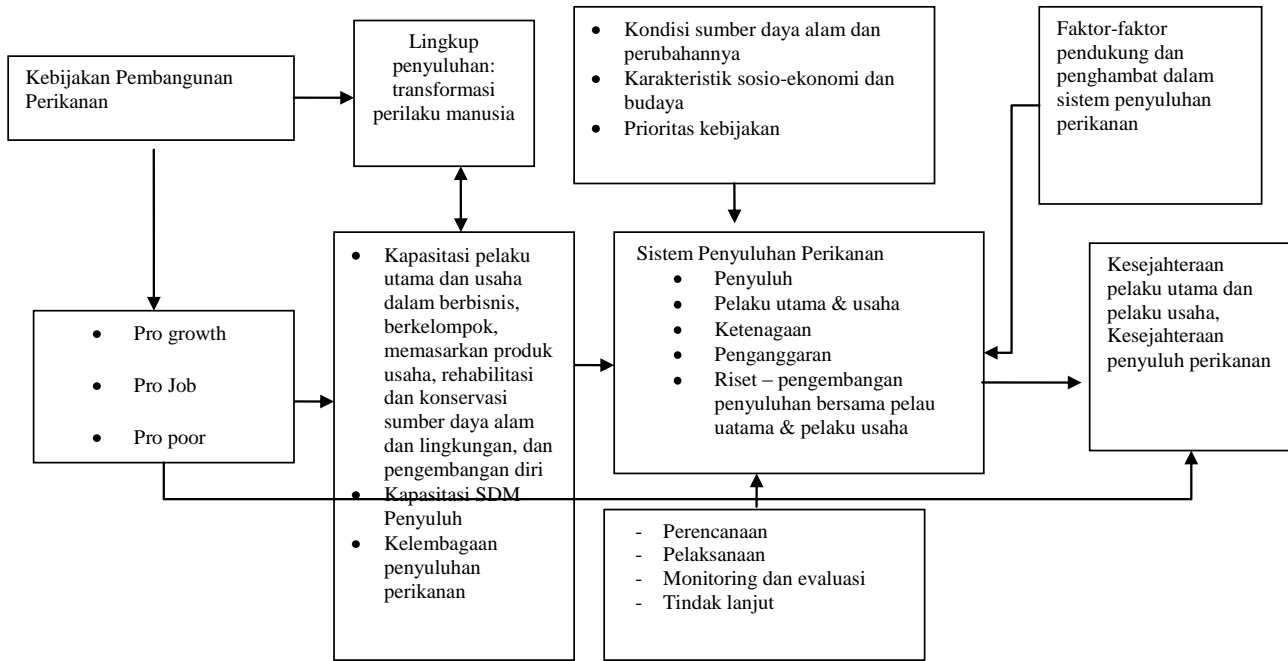
Gambar 2. Komponen Layanan Penyuluhan dalam Sistem Penyuluhan Perikanan mengantisipasi Era Perubahan

yang berisikan metode dan teknik-teknik advokasi masyarakat, pendekatan partisipatori dalam penyuluhan, dan pengembangan kelembagaan dan jaringan sosial ekonomi di masyarakat nelayan. Selanjutnya, untuk mendukung, penyuluh perlu distimulasi dengan sarana komunikasi dan transportasi yang mendukung mobilitas mereka dalam bertugas, serta sistem *awards* yang jelas.

Dengan demikian sistem penyuluhan perikanan yang dapat mengantisipasi era perubahan perlu didasarkan perubahan. Terkait perubahan, menarik apa yang dikemukakan Vago (1985) tentang perubahan. Perubahan dapat dilihat dari sisi sosio budaya. Ada tiga tipe perubahan yang berkaitan dengan budaya yaitu evolusi, difusi, akulturasi, sedangkan bentuk perubahan yang

berkaitan dengan masyarakat, meliputi revolusi, modernisasi, industrialisasi, urbanisasi dan birokratisasi. Bahasan mengenai sistem penyuluhan perikanan, tentu tak cukup ditinjau dari kedua bentuk perubahan itu, karena terkait pula dengan kondisi spesifik sumber daya alam dan lingkungan. Terlebih di tahun 2000-an ini, kondisi alam semakin menurun, antara lain karena perubahan iklim dan juga perilaku manusia yang over-eksploitatif terhadap sumber daya perikanan dan laut.

Dengan demikian, sistem penyuluhan perikanan yang perlu dikembangkan perlu didasarkan pada kondisi spesifik sumber daya yang dihadapi, baik sumber daya alam mau pun manusia, kebijakan dan strategi pembangunan perikanan, organisasi penyuluh



Gambar 3. Sistem Penyuluhan Perikanan yang Berkelanjutan

dan dukungan kelembagaan penyuluhan (termasuk mekanisme kerja, ketenagaan, penganggaran, dan sistem monitoring dan evaluasi) pendidikan dan latihan untuk penyuluh (peningkatan wawasan dan kompetensi), pengembangan teknologi dan inovasi perikanan yang efisien dan berkelanjutan (dapat dihasilkan dari riset-riset berbasis potensi lokal), dan sistem reward. Untuk mendukung penyelenggaraan penyuluhan perikanan yang dapat menyokong tercapainya tujuan pembangunan perikanan maka diperlukan sistem yang dapat mengintegrasikan komponen layanan penyuluhan seperti Gambar 2. Selanjutnya Gambar 3 mencoba menggambarkan keterkaitan elemen dalam sistem penyuluhan perikanan di era perubahan.

**Penutup**

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem penyuluhan perikanan dalam mengantisipasi perubahan harus memiliki sumber daya manusia penyuluh perikanan yang profesional.

Profesionalitas itu dapat dimanifestasikan dalam bentuk kompetensi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha, dan tuntutan perubahan kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang kompleks. Tantangan penyuluhan perikanan ke depan tak hanya berkisar pada masalah kapasitas pelaku utama dan usaha, namun perlu pula dikembangkan strategi pengembangan SDM penyuluh perikanan yang dibangun secara sistemik oleh Departemen Kelautan dan Perikanan dengan bekerja sama dengan multi pihak, baik pemerintah, swasta, dan representasi masyarakat terkait.

Perubahan-perubahan yang dihadapi dan harus diantisipasi melalui sistem penyuluhan di bidang perikanan-kelautan meliputi:

1. Perubahan kondisi sumber daya alam meliputi penurunan kondisi lingkungan, perubahan iklim, dan keterbatasan ruang pemanfaatan sumber daya
2. Perubahan arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan-perikanan yang berkaitan dengan skala prioritas
3. Tuntutan kebutuhan dari masyarakat, baik pelaku utama mau pun pelaku usaha, yang berdampak pada tuntutan profesionalitas

penyuluh perikanan yang kompeten di bidangnya, sehingga pengembangan SDM penyuluh mendesak untuk dilakukan

4. Pengembangan struktur organisasi penyuluhan perikanan baik di tingkat pusat mau pun daerah yang lentur, namun tetap dalam koridor pelayanan penyuluhan yang bermutu
5. Perubahan teknologi dan modernisasi di bidang perikanan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha, dengan mempertimbangkan kompleksitas, triabilitas, efisiensi, kompatibilitas, dan adaptabilitasnya baik terhadap lingkungan fisik, mau pun lingkungan sosial-politik, dan budaya setempat

Dengan demikian, sistem penyuluhan perikanan perlu dibangun dengan manajemen sistem yang handal yang mampu mensinergiskan keberadaan ekosistem alam dan karakteristik sistem humanistik yang di dalamnya ada komunitas nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, dan kelompok masyarakat lainnya. Manajemen sistem penyuluhan perikanan yang handal perlu didukung oleh mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pendekatan monitoring dan evaluasi yang mantap dan berkelanjutan.

### **Rujukan**

- Alex, Zipd, dan Byerlee (2001). *Rural Extension and Advisory Services: New Directions*. Washington DC: The World Bank, AKIS (Draft doc.).
- Amanah, S. Fatchiya, A., dan Syahidah. D. 2004. *Pemodelan Penyuluhan Perikanan pada Masyarakat Pesisir melalui Pendekatan Partisipatif*. Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi X/2002-2004. Bogor: Institut Pertanian Bogor dan Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Terapan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Amanah, S. 2007. *Kearifan Lokal dalam Pengembangan Komunitas Pesisir*. Bandung: CV. Citra Praya -Sub. Divisi dari PT Grafindo Media Pratama.
- \_\_\_\_\_, 2000a. *Peran Strategis Penyuluhan Pembangunan: Tinjauan dari Sisi Akademis*. Prosiding Sarasehan Nasional Penyuluhan Pembangunan: "Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dan Urgensi Kelembagaan Sertifikasi". Bogor: Program Mayor PPN SPs IPB.
- \_\_\_\_\_, 2008b. *Refleksi dan Rekomendasi Implementasi Penyuluhan Perikanan dalam Pembangunan yang Berpusat pada Manusia*. Dalam buku: *Pemberdayaan Manusia Pembangunan yang Bermartabat* (Editor: Ida Yustina dan Adjat Sudrajat), didedikasikan kepada Prof. Pang S. Asngari Medan: Pustaka Bangsa Press dan Sydex Plus.
- Asngari, Pang S. 2001. "*Peranan Agen Pembaharuan/ Penyuluh dalam Usaha Memberdayakan (Empowerment) Sumber Daya Manusia Pengelola Agribisnis*." Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Sosial Ekonomi Peternakan. Bogor: Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.
- Chambers, Robert. 1992. *Methods for Analysis by Farmers: The Professional Challenge*. Brighton: IDS Discussion Paper 311.
- Charles, Anthony T. 2001. *Sustainable Fishery Systems*. Oxford: Blackwell Science Ltd.
- Clark, C.W. 1985. *Bioeconomic Modelling and Fisheries Management*. New York: Wiley.
- Hanson, Arthur J. 1984. *Coastal Community: International Perspectives*. Makalah pada The 26<sup>th</sup> Annual Meeting of the Canadian Commission for

- UNESCO, St John's Newfoundland, 6<sup>th</sup> June 1984.
- Ife, Jim. 2000. *Community Development: Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Longman Australia, Pty Ltd.
- Kelsey, L.D., dan C. C. Hearne. 1955. *Cooperative Extension Work*. Edisi Kedua. Ithaca, New York: Comstock Publishing Associated.
- Leeuwis, C. 2004. *Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Pretty, Jules N. 1995. *Regenerating Agriculture*. London: Earthscan Publication.
- Slamet, M. 2008. Perkembangan Penyuluhan: Teori dan Praktek. Prosiding Sarasehan Nasional Penyuluhan Pembangunan: "Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dan Urgensi Kelembagaan Sertifikasi". Bogor: Program Mayor PPN SPs IPB.
- Sten Sverdrup-Jensen and Jesper Raakjær Nielsen, 1998. *Integrated Coastal Management in South African*, (paper hasil penelitian, tanpa nama penerbit). [www.dkp.go.id](http://www.dkp.go.id) diakses pada 25 Februari 2008, 19 September 2008, 17 November 2008.